

Hasil & Rekomendasi Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI II

Pendahuluan

Pertemuan Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI II (Forum II) yang dilaksanakan di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 9 dan 10 September, 2008, menghasilkan berbagai rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang semakin menajamkan pemikiran dan rekomendasi yang dihasilkan pada Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI I (Forum I). Pemikiran serta rekomendasi tersebut diarahkan untuk mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui penguatan kapasitas dan kolaborasi multipihak. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kolaborasi antar provinsi.

Rangkuman pertemuan Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI II dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu:

1. Peningkatan kinerja pembangunan melalui penguatan hubungan dan keterkaitan antara RPJMN dan RPJMD
2. Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi yang menitikberatkan pada data perdesaan
3. Peningkatan Kapasitas SDM maupun Kelembagaan untuk mendukung koordinasi

I. Peningkatan kinerja pembangunan melalui penguatan hubungan dan keterkaitan antara RPJMN dan RPJMD

Sebagaimana dikemukakan pada Forum I, RPJMN seharusnya menjadi salah satu dokumen referensi perencanaan utama bagi wilayah dalam penyusunan RPJMD dengan sasaran terukur guna mendukung agenda pembangunan nasional. Perencanaan yang dilakukan seharusnya memiliki dua sisi utama yang menjadi perhatian, yaitu: 1) perencanaan sektoral dan 2) perencanaan spasial.

Tantangan yang dihadapi berhubungan dengan kepemimpinan terpilih di masing-masing daerah, karena tidak selalu sejalan dengan visi kepemimpinan nasional. Secara substantif, banyak RPJMD tidak memiliki hubungan jelas dengan RPJMN, Hal ini juga terkait dengan keberadaan dan konteks masing-masing daerah. Meskipun demikian, diharapkan keterkaitan yang jelas antara rancangan daerah dan rencana nasional.

Keterbatasan keterkaitan saat ini menimbulkan kecenderungan pada kementerian sektoral untuk melakukan "resentralisasi" dimana kewenangan ditarik kembali ke pusat (misalnya tenaga penyuluh pertanian), meskipun hal ini bertentangan dengan berbagai UU terkait dengan otonomi daerah/desentralisasi.

Disadari bahwa perencanaan daerah pasti akan mengisi pada rancangan pusat asal telah dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik. Tolak ukur yang jelas terhadap setiap butir tujuan RPJMN juga akan mendukung pencapaian tersebut.

Dibutuhkan pengkajian kembali dokumen perencanaan di masing-masing daerah guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapai penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Penguatan dokumen perencanaan daerah juga akan mempermudah penyesuaian dari berbagai donor/mitra pembangunan internasional agar sejalan dengan rancangan dan kalender wilayah.

Untuk tahun 2009, BAPPEDA Provinsi diharapkan sebagai pelaksana atau SATKER pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah melalui pelibatan perguruan tinggi masing-masing provinsi. Tugas ini dapat meningkatkan peran BAPPEDA dalam interaksinya dengan SKPD dan juga dengan pihak kabupaten dan kota. RPJMD tingkat provinsi sangat penting sebagai acuan bagi kabupaten dan kota, oleh sebab itu sangat dibutuhkan RPJMD Provinsi yang kuat berdasarkan RPJMN yang jelas target capaiannya. Juga dibutuhkan



kebijakan yang jelas menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur untuk menghindari kerancuan pendapat dengan DPRD.

Program desa mandiri Maluku dapat dijadikan salah satu contoh sebagai salah satu upaya daerah guna menjalankan RPJMD yang difokuskan pada pembangunan Maluku sebagai provinsi kepulauan berbasis gugus pulau. Program ini sekaligus menggabungkan berbagai program tingkat nasional sehingga lebih efektif dan saling mengisi.

II. Integrasi Sistem Informasi

Secara konkrit yang dibutuhkan adalah sistem informasi perencanaan yang dihubungkan dengan pengukuran evaluasi kinerja pembangunan. Saat ini terdapat berbagai upaya untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan daerah yang dapat mengukur capaian dan kinerja pembangunan, termasuk Sistem Informasi Profil Daerah yang dikembangkan oleh DIRJEN BANGDA, DEPdagri. Juga dikembangkan sistem informasi pembangunan terpadu, namun masih menghadapi kendala dalam kolaborasi antar departemen. Sistem informasi profil pembangunan daerah tersebut masih harus diintegrasikan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh SKPD (misalnya kepegawaian, keuangan dan perencanaan). Belum ada SIPD untuk kabupaten-kabupaten baru.

Diakui bahwa salah satu titik kunci adalah informasi yang valid dari masing-masing desa/kampung. Perubahan yang dicatat di tingkat kampung mengisi pada evaluasi kinerja daerah dan mengisi kebutuhan data pusat. Dalam hal ini, Sekretaris Desa seharusnya dijadikan PNS sehingga peran sebagai penyedia data dapat dilaksanakan secara lebih baik. Data berbasis kampung juga dapat mendukung upaya untuk mengurangi ego-sektoral melalui upaya terpadu untuk mencapai kemandirian di tingkat desa.

Sistem informasi yang dibutuhkan harus memadukan data dan informasi yang dikandung dalam dokumen-dokumen perencanaan tingkat Provinsi (misalnya RPJPD Provinsi, Renstra Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RTRW Provinsi, TATRAWIL Provinsi).

Diharapkan agar DSF dapat memfasilitasi daerah khususnya di KTI dalam penyusunan baseline data atau profil pembangunan daerah terpadu, juga melalui penguatan peran BPS dan BAPPEDA.

Sistem ini akan mendorong proses penguatan kembali pelaporan dari tingkat provinsi dan bertahap pada kabupaten. Saat ini setiap provinsi menghadapi tantangan konsolidasi pelaporan kinerja pembangunan dan sangat membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dapat dikembangkan matriks/bagan yang disusun Bp. Madjid Sallatu mengenai sistem informasi perencanaan (Lihat lampiran 1).

Diakui bahwa secara struktural tidak terdapat hubungan langsung antara BAPPENAS dan BAPPEDA. Dibutuhkan upaya untuk mengembangkan kolaborasi dan kebersamaan sebagai sesama perencana. Keeratan hubungan antar BAPPENAS dan BAPPEDA perlu dikembangkan kembali, melalui program kerjasama yang lebih konkrit.

Pemanfaatan BPS juga harus dilihat sumber data BPS sendiri. Dikemukakan permasalahan yang dihadapi dalam hubungan antara provinsi dan kabupaten, dimana salah satu sumber data BPS adalah dari SKPD Kabupaten. Tanggung-jawab SKPD perlu ditingkatkan untuk menjamin validitas data yang diberikan kepada BPS. Guna menjamin validitas data yang dikumpulkan, dibutuhkan dukungan substantif bagi tenaga yang bertugas mengumpulkan data.

Website dan portal data/informasi juga dibutuhkan untuk mengembangkan kerjasama dan pertukaran informasi yang dikelola melalui pembentukan sekretariat bersama (termasuk personilnya). Dalam hal ini dipertimbangkan pengembangan sistem informasi se-KTI yang memanfaatkan jaringan yang sudah ada di BaKTI dan jaringan forum KTI karena bersifat multistakeholder dan sudah ada "rumah" masing-masing di setiap provinsi, minimum pada tahap awal ini.

III. Capacity Building SDM dan Kelembagaan

Pembahasan peningkatan kapasitas difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Dari sisi kapasitas kelembagaan serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan berwibawa, maka sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-government procurement system) diperkenalkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Rekomendasi forum sebagai respon terhadap presentasi tersebut adalah untuk mendorong adanya penambahan 5 (lima) pilot project daerah di KTI (saat ini sudah diluncurkan di Provinsi Gorontalo).

Aspek kelembagaan lain yang diperbincangkan adalah pengembangan forum Kepala BAPPEDA Se-KTI secara kelembagaan agar menjamin keterlanjutannya, misalnya dalam bentuk Badan Kerjasama BAPPEDA se-KTI. Pertimbangan dasar terhadap penguatan lembaga kerjasama ini adalah karena pembangunan di KTI masih berkuat dengan pikiran berbasis sektor dan bukan berbasis wilayah.

Pelaksanaan INPRES 7/2002 mengenai percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang sampai saat ini dianggap masih berlaku sehingga perlu diaktifkan kembali. INPRES tersebut dapat mendukung kontekstualisasi perencanaan pembangunan sebagai perspektif bersama untuk menghadapi tantangan pembangunan di masing-masing wilayah KTI, termasuk perubahan paradigma perencanaan berorientasi kontinental menjadi paradigma yang berorientasi kelautan.

Wadah ini juga dapat berperan untuk mendorong pertukaran pengalaman dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi dan komunikasi guna menjamin pemerataan pembangunan di KTI. Melalui koordinasi yang lebih baik, dapat dikembangkan sentra produksi, transportasi dan pengolahan produk. Saat ini baru ada 2 (dua) pusat konsolidasi kargo (Makassar dan Bitung), sementara konsolidasi produk unggulan daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan skala ekonomi produksi di KTI.

Untuk itu dibutuhkan pengembangan infrastruktur secara terpadu misalnya transportasi yang masih menghambat pembangunan daerah dan membutuhkan pendekatan forum bersama untuk mendorong bersama kebijakan yang dibutuhkan.

Upaya penanggulangan kemiskinan di masing-masing provinsi melalui tim Koordinasi sebagai payung menjadi salah satu tumpuan badan koordinasi ini untuk mendukung pembangunan yang difokuskan pada perdesaan, karena saat ini, tidak nampak koordinasi dan keterpaduan yang baik antar program-program pemberdayaan masyarakat (misalnya PNPM).

Disepakati bahwa perlu dikembangkan rencana aksi bersama dengan pembagian tugas secara baik. Pada tanggal 19 September akan dilaksanakan pertemuan di Makassar (JICA) yang dapat dimanfaatkan untuk berkoordinasi lebih jauh, termasuk pendanaan untuk badan ini harus dikembangkan sumber-sumbernya.

Dalam pengembangan badan kerjasama, dibutuhkan telaah terhadap Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) dan badan sejenis lainnya sebelum menetapkan pembentukan badan kerjasama ini. Studi-studi untuk mengangkat kluster-kluster pembangunan juga perlu dikembangkan dan didukung dan dimanfaatkan sebagai dasar koordinasi bersama sebelum MUSRENBANGNAS sehingga ada agenda prioritas bersama yang dibawakan pada saat pelaksanaan MUSRENBANG, misalnya untuk mengembangkan acuan RPJM KTI yang memadukan rencana masing-masing provinsi agar nampak keterpaduan antar daerah dan sekaligus menjadi masukan bagi kepentingan perencanaan nasional.

Konsep Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) di Papua Barat perlu diperhatikan lebih jauh untuk menjaga konsistensi pembangunan daerah. Struktur BP3D memungkinkan

untuk berperan sebagai pengawas pembangunan terutama menghadapi kendala ego-sektoral dan untuk menjembatani misi-visi pimpinan daerah terpilih.

Melalui kerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan BAPPENAS dapat dikembangkan program pengembangan SDM perencana, khususnya kualitas tenaga fungsional perencana. Selain itu, diharapkan juga DSF dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM perencana di KTI melalui pelatihan pendidikan S2/S3 atau diklat serta melalui diseminasi *smart practices*.

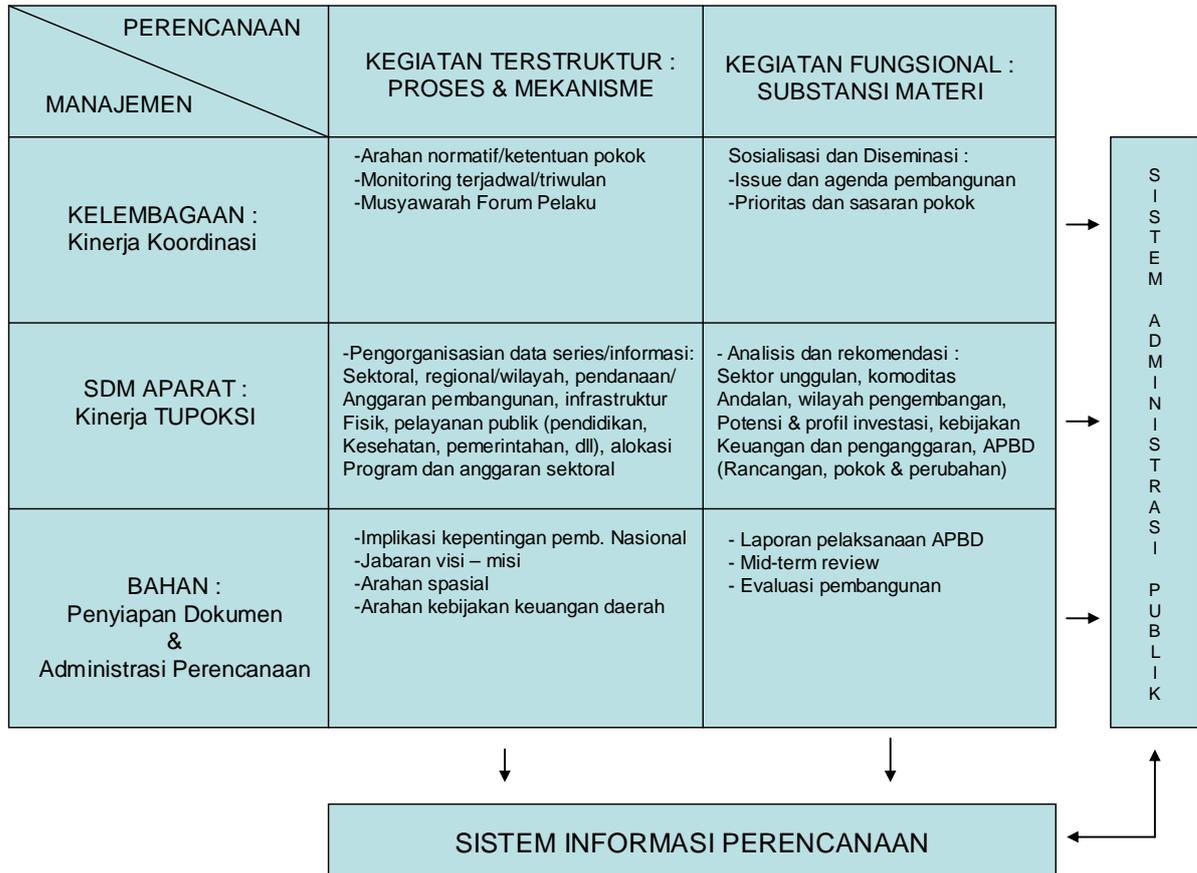
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi Forum

Forum menyimpulkan pentingnya peningkatan kinerja pembangunan di KTI yang terukur melalui kerjasama dengan BAPPENAS dan DEPDIAGRI. Forum merekomendasikan:

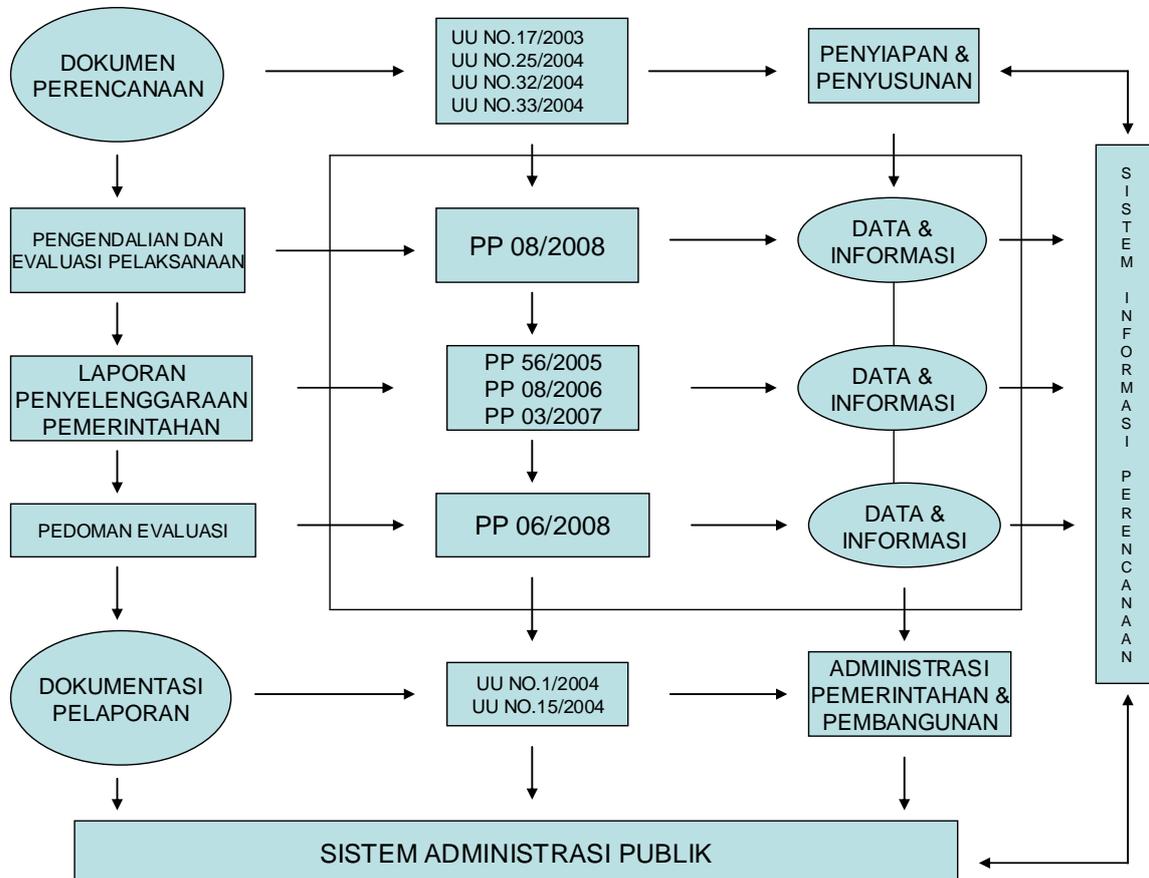
1. Perlu dikaji dengan cara pembentukan Badan Kerjasama antar BAPPEDA se-KTI dengan memperhatikan pelajaran dari badan yang sudah ada (misalnya BKPRS);
2. Pengembangan sistem informasi yang memadukan rancangan pusat dengan pembangunan berbasis kampung/desa agar dikembangkan sebagai alat pengukuran kinerja pembangunan;
3. Pengembangan kajian perekonomian berbasis wilayah agar dikembangkan bersama untuk menetapkan pusat-pusat produksi, pengelolaan dan pendistribusian komoditas unggulan KTI;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga fungsional perencana dikembangkan dengan kerjasama BAPPENAS;
5. Pengembangan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Bappeda untuk mendukung pengawasan dan pengukuran kinerja pembangunan;
6. Perwujudan tata pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan berwibawa, melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, melalui penambahan pilot project di 5 provinsi KTI;
7. Pertemuan Forum BAPPEDA Se-KTI III agar dilaksanakan di kota Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Lampiran 1

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
(Internal BAPPEDA)



SISTEM INFORMASI PERENCANAAN :
(Keterintegrasian – Pemda Propinsi)



Daftar Peserta Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI II:

Nama	Institusi
Drs. Alex Rumaseb, MM	Kepala Bappeda Provinsi Papua
Oktavianus Mayor	Sek. Ka. Bappeda Provinsi Papua Barat
Drs. Mahdan, Msi	Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ir. Benny R. Ndoenboey, Msi	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dr. Lucky Longdong, Med	Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
Masniaty Masdulvak	Kepala Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Program Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Prof. DR. Hj. Winarni Monoarfa, MS	Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo / Anggota POKJA Forum KTI
Ir. Syarif Burhanuddin, M. Eng	Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat
Dr. Darwin Tike, SE, Msi	Wakil Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
Drs. La Ode Ali Hanafi, Msi	Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Syafruddin Sapsuha	Bappeda Provinsi Maluku Utara
Dr. Ristiano Sugiono	Kepala Bappeda Provinsi Maluku
Dr. Marwah Daud Ibrahim	Anggota DPR - RI / Anggota Pokja Forum KTI
Bambang Widiyanto PhD	Deputi Menteri/Kepala Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dr. Avip Saefullah	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Bappenas
Bagus Agung Herbowo, ST, MT	Ditjen Bina Bangda, Depdagri
Dr. H. S. Ruslan, SE, MS	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah/Anggota POKJA Forum KTI
Drs. Dadang Solihin, MA	Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas
DR. Mien Ratoe Oedjoe, M.Pd	Kepala Pusat Pemberdayaan Perempuan UNDANA Kupang/Anggota POKJA Forum KTI
Ir. Syamsu Barhiman, MS	Pembantu Dekan II, Fakultas Pertanian UNDANA, Kupang / Focal Point JiKTI (Jaringan Peneliti KTI)
Petrarca Karetji	Direktur Eksekutif SoFEI



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



Nama	Institusi
Richard Manning	Direktur Program ANTARA
Jana Hertz	Decentralization Support Facility (DSF)
Matsui Kazuhisa	JICA Expert

Forum KTI

Sekretariat Eastern Indonesia Forum

Jl. Dr. Sutomo no. 26, Makassar, Sulawesi Selatan

Telp. (0411) 3650320-22 Fax: (0411) 3650323

ANTARA

(Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy)

Jl. Polisi Militer No.2, Oepoi, Kupang 8500, NTT

Telp. (0380) 833099 Fax: (0380) 83319